

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS PERDAGANGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2014-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2014-2018).

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rاپang Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 22 indikator kinerja utama, terdapat 17 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari,

masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Pangkajene Sidenreng, Januari 2019
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

WAHYUDDIN, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590327 198603 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Isu Strategis	3
E. Struktur Organisasi	3
F. Komposisi SDM Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	<u>13</u>
A. Rencana Strategis	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Indikator Kinerja	14
3. Sasarandan Indikator Kinerja	16
4. Program untuk Pencapaian Sasaran	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	<u>20</u>
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	<u>22</u>
D. Rencana Anggaran Tahun 2018	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	<u>26</u>
Capaian Kinerja Organisasi	<u>26</u>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	<u>26</u>

B. Capaian Kinerja organisasi	28
C. Realisasi Anggaran	45

BAB IV PENUTUP	50
-----------------------	----

LAMPIRAN		42
-----------------	--	----

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidrap	15
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidrap	18
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	21
Tabel 2.5	IKU Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	22
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	23
Tabel 2.7	Alokasi Persasaran Tahun 2018	24
Tabel 3.1	Capaian IKU	27
Tabel 3.2	Skala dan Nilai Perangkat Kinerja	28
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018	46
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kab.Sidrap	7
Gambar 1.2	Komposisi SDM berdasarkan Gender	8
Gambar 1.3	Persentase menurut Jenjang Pendidikan	10
Gambar 1.4	Perimbangan PNS perjenjang Pendidikan dan terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018	11
Gambar 1.5	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	12

Lampiran-lampiran :

- Penghargaan yang diterima pada tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis



instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dinas teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas untuk mengawasi, membina dan mengelola rumah tangga daerah dibidang industri, perdagangan dan pasar yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penggabungan/pemisahan antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan yang didalamnya terdapat Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Pengelolaan Pasar. Sedangkan Bidang Koperasi dan Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terbentuk pada tahun 2011 berdiri sendiri dan bergabung dengan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi pada Dinas



Sosial dan nakertrans, dan sekarang menjadi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Perdagangan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Perdagangan;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Pengelolaan Pasar.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sidrap dalam menunjang tugas dan tanggung jawab pada Dinas Perdagangan Kab. Sidrap.
2. Jumlah Aparatur Industri dan Perdagangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
3. Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri dan Perdagangan, relatif masih kurang memadai.
4. Krisis ekonomi global yang berdampak pada tata niaga dan daya saing produk industri lokal.
5. Tingginya harga pokok produksi sebagai akibat tingginya harga bahan baku penolong dan mesin peralatan industri.
6. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah bagi keharusan penerapan pola Petik Olah Jual.
7. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi untuk 5 (lima) tahun ke depan.
8. Tingkat kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah masih rendah
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah masih bersifat manual



E. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seketaris Dinas;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perdagangan;
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen
 2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga
- d. Bidang Perindustrian
 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
 2. Seksi Perizinan
- e. Bidang Pengelolaan Pasar
 1. Seksi Pengelolaan Retribusi
 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut, antara lain:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
 4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan dan stabilitas harga.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan;



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar.

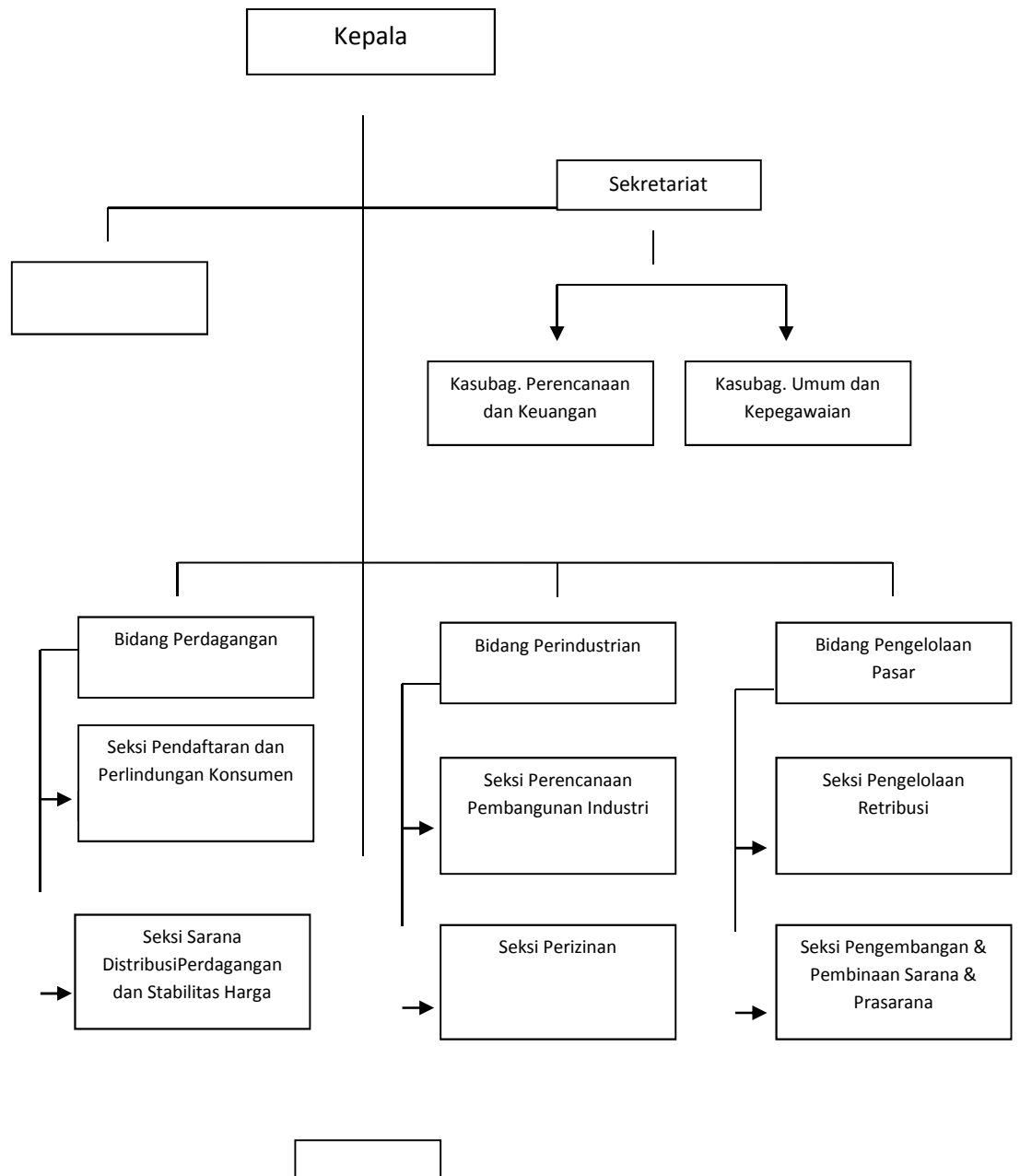
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pengelolaan pasar mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan bimbingan sarana dan prasarana pasar;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016





Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 65 PNS dan 26 Non PNS (Tenaga Sosial).

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi pembangunan disegala bidang. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia mempunyai akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi didalamnya serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki keterkaitan dengan keadilan yang merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan keterangan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Gambar 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Gender pada Dinas Perdagangan



NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	33	32

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

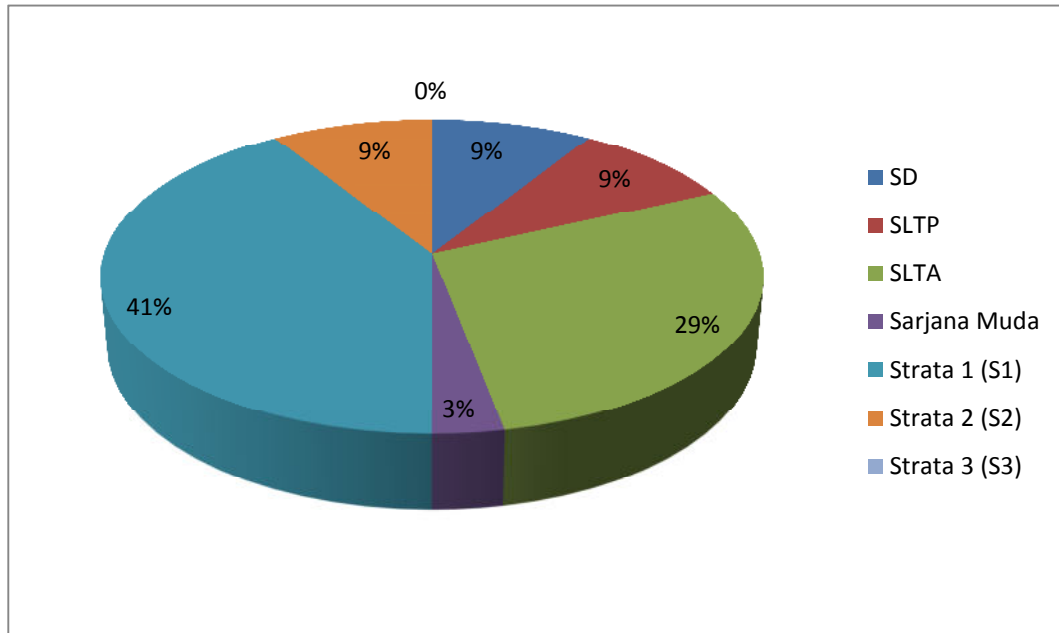
Untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

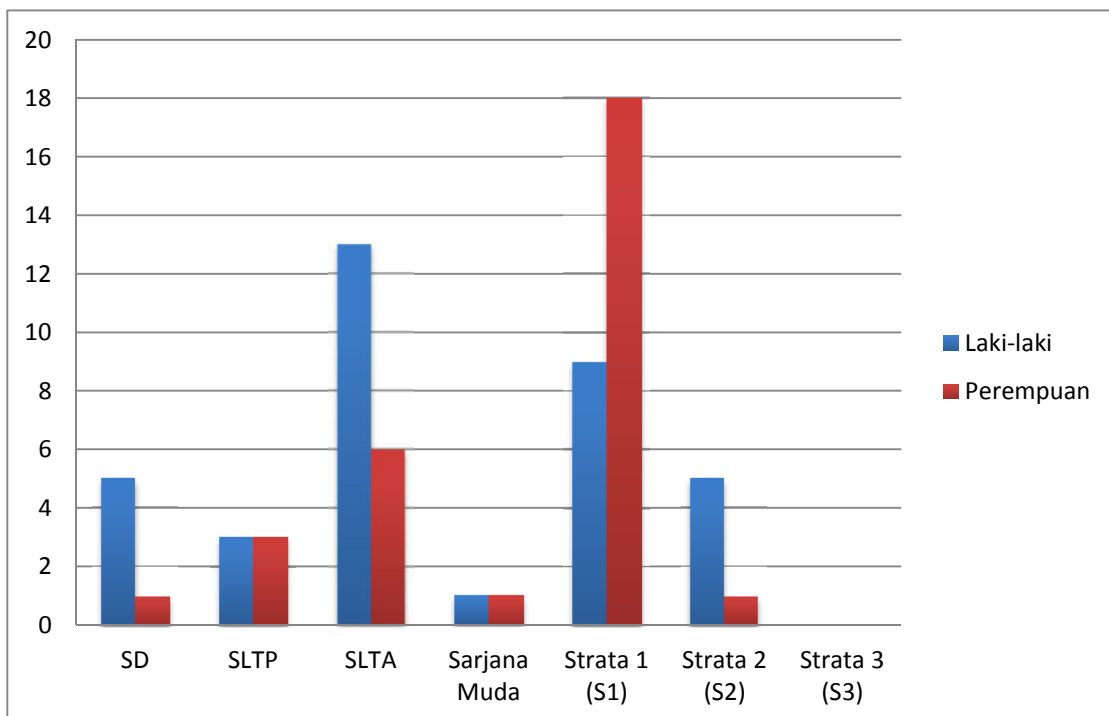
No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	2	-	2
2.	SLTP	2	1	3
3.	SLTA	12	13	25
4.	Sarjana Muda	1	1	2
5.	Strata 1 (S1)	12	15	27
6.	Strata 2 (S2)	4	2	6
7.	Strata 3 (S3)	0	0	0
Jumlah		33	32	65



Gambar 1.4 Persentase menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.5. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2018





Komposisi PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 7 orang

Gambar 1.6. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Kepala	II/b	1	-
2.	Sekretaris	III/a	-	1
	a. Kasubag. Umum & Kepegawaian	IV/a	-	1
	- Staf	-	1	3
	b. Kasubag. Perencanaan & Keuangan	IV/a	-	1
	- Staf	-	1	4
3.	Kepala Bidang Perdagangan	III/b	1	-
	a. Kasi Sarana Distribusi Perdagangan & Stabilisasi Harga	IV/a	1	-
	- Staf	-	1	-
	b. Kasi Pendaftaran Perusahaan & Perlindungan Konsumen	IV/a	-	1
	- Staf	-	-	2
5.	Kepala Bidang Perindustrian	III/b	1	-
	a. Kasi Perizinan	IV/a	1	-
	- Staf	-	1	1
	b. Kasi Perencanaan Pembangunan Industri	IV/a	-	1
	- Staf	-	1	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	III/b	1	-
	a. Kasi Pengelolaan Retribusi Pasar	IV/a	1	-
	- Staf	-	-	4
	b. Kasi Pengembangan dan Pembina Sarana & Prasarana	IV/a	1	-
	- Staf	-	4	-
6.	Staf Pasar	-	16	11
JUMLAH			36	29



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan (*future from the future*), ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: **“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya saing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar “**

MISI:

Untuk mencapai Visi tersebut diperlukan misi dengan sasaran tujuan yang terukur sehingga didalam pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan dengan terarah dan terukur, dengan melibatkan semua stakeholder yang pada akhirnya visi tersebut dapat tercapai, adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :



- a. Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas IKM.
- b. Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya.
- c. Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya.
- d. Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah.

2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas IKM.

Tujuan: 1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi.

Misi 2 Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya

Tujuan:

1. Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya.

Misi 3 Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan usaha perdagangan yang mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya

Tujuan:



1. Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Misi 4 Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, serta menata seluruh sumber daya yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan daerah.

Tujuan:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang



TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	75 IKM
	Terfasilitasinya industri kecil menengah dengan swasta	IKM	-	50 IKM
	Tersedianya sarana informasi IKM	Laporan	-	4 Laporan
	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	-	100 Persen
	Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industry	Orang/IKM	-	300 Orang/IKM
	Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan	Pengrajin/ Ibu Rumah Tangga	-	125 Pengrajin/ Ibu Rumah Tangga
	Terwujudnya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM	IKM	-	60 IKM
	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industry	Orang dan Dokumen	-	20 Orang dan 1 Dokumen
Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya	Tersedianya sarana dan prasarana klaster industry	Unit	-	31 Unit
	Tersedianya sarana informasi IKM	Kecamatan	-	11 Kecamatan
	Tersedianya lahan kawasan industry	Ha	-	400 Ha
	Terwujudnya pembangunan kawasan IKM	Paket	-	1 Paket
Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Buah	6.456 Buah	34.769 Buah
	Terlaksananya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Buah	760 Buah	4.400 Buah
	Terwujudnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kali	-	260 Kali
	Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan	Kali	-	65 Kali



	terjangkau			
	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	Unit	-	3 Unit
	Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya	Kali	-	13 Kali
Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Milyar	-	7,5 Milyar

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Peningkatan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri Manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan
2. Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta
3. Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan
4. Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM
5. Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga
7. Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten
8. Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC



Tujuan 2 Peningkatan Industri sebagai basis pengembangan industri yang mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya

Sasaran :

1. Meningkatnya penghasilan bagi Ibu-ibu rumah tangga
2. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri mikro, kecil dan menengah.
3. Meningkatnya akses industri
4. Meningkatnya status sentra industri kecil masuk dalam sistem kluster industri kecil

Tujuan 3 Peningkatan efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Sasaran :

1. Meningkatnya perlindungan konsumen
2. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri

Tujuan 4 Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah (retribusi pasar)

Sasaran : Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	75 IKM
Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta	Terfasilitasinya industri kecil menengah dengan swasta	IKM	-	50 IKM
Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan	Tersedianya sarana informasi IKM	Laporan	-	4 Laporan
Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	-	100 Persen
Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM	Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industry	Orang/IKM	-	300 Orang/IKM
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga	Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan	Pengrajin/Ibu Rumah Tangga	-	125 Pengrajin/Ibu Rumah Tangga
Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten	Terwujudnya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM	IKM	-	60 IKM
Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industry	Orang dan Dokumen	-	20 Orang dan 1 Dokumen
Meningkatnya penghasilan bagi Ibu-ibu rumah tangga	Tersedianya sarana dan prasarana klaster industry	Unit	-	31 Unit
Meningkatnya pertumbuhan dan	Tersedianya sarana informasi	Kecamatan	-	11 Kecamatan



perkembangan Industri mikro, kecil dan menengah	IKM			
Meningkatnya akses industry	Tersedianya lahan kawasan industry	Ha	-	400 Ha
Meningkatnya status sentra industri kecil masuk dalam sistem klaster industri kecil	Terwujudnya pembangunan kawasan IKM	Paket	-	1 Paket
Meningkatnya perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulangalat UTTP	Buah	6.456 Buah	34.769 Buah

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Buah	760 Buah	4.400 Buah
	Terwujudnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kali	-	260 Kali
	Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	Kali	-	65 Kali
	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	Unit	-	3 Unit
	Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya	Kali	-	13 Kali
Tercapainya target PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Milyar	-	7,5 Milyar



4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan	Program pengembangan industri kecil dan menengah
Terfasilitasinya kerjasama antar IKM dengan swasta	
Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan	
Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	
Meningkatnya keterampilan Ibu-ibu rumah tangga dan Pengrajin IKM	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Pengrajin/Ibu-ibu rumah tangga	
Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Kabupaten	
Meningkatnya kemampuan KUB/Kelompok Tani dalam membuat POC	
Meningkatnya perlindungan konsumen	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Tercapainya target PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2018, IKU dan APBD. Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:



Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018
1.	Terpenuhinya operasional Administrasi Kepegawaian	Tersedianya sarana administrasi Perkantoran	Bulan	12
2.	Terpenuhinya sarana Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana Aparatur	Tahun	1
3.	Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	8
4.	Pelaku Usaha dan Masyarakat Luas	Masyarakat Mendapatkan Informasi Pasar Lebih Mudah dan Cepat	Pelaku Usaha	200
5.	Pelaku Usaha	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Pelaku Usaha	1.000
6.	Masyarakat Luas	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	Paket	80.136
7.	Pelaku Industri Kecil Menengah 11 Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan informasi IKM yang dapat diakses masyarakat	Laporan	1
8.	Kelompok Industri Kecil	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah melalui pemberian perelatan secara hibah	Kelompok	14



	Menengah	Meningkatnya keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan pengrajin IKM	IKM	
9.	Ibu Rumah Tangga dan Pengrajin Industri Kecil Menengah		Kali/Orang	3 kali/60 orang
10.	Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel, transparan dan berdaya saing sesuai standar nasional "pasar rakyat" Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel,	Peningkatan/pencapaian Penerimaan retribusi Pasar.	Rp.	7.227.458.000
11.	transparan dan berdaya saing sesuai standar nasional "pasar rakyat"	Penyediaan sarana/ Prasarana operasional Pengelolaan Pasar.	Unit Pasar	14
12.	Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel, transparan dan berdaya saing sesuai standar nasional "pasar rakyat"	Tersedianya layanan Informasi harga/ produk	Pasar/ Bulan	14 pasar/12 Bulan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:



Tabel 2.5. IKU Dinas Perdagangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT.	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sarana administrasi Perkantoran	Persen		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
	Tersedianya sarana prasarana Aparatur	Persen		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen		
Pelaku Usaha dan Masyarakat Luas	Masyarakat Mendapatkan Informasi Pasar Lebih Mudah dan Cepat	Pelaku Usaha		
Pelaku Usaha	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Pelaku Usaha		
Masyarakat Luas	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	Paket		
Pelaku Industri Kecil Menengah 11 Kecamatan	Terpenyediaanya kebutuhan informasi IKM yang dapat diakses masyarakat	Lap.		
Kelompok Industri Kecil Menengah	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah melalui pemberian peralatan secara hibah	Klp.IKM		
Ibu Rumah Tangga dan Pengrajin Industri Kecil Menengah	Meningkatnya ketereampilan ibu-ibu rumah tangga dan pengrajin IKM	Kali/org		



Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel, transparan dan berdaya saing sesuai standar nasional “pasar rakyat”	Peningkatan/pencapaian penerimaan retribusi pasar	Rp.	
	Penyediaan sarana/prasarana operasional pengelolaan pasar	Unit pasar	
	Tersedianya layanan informasi harga/produk	Pasar/ Bulan	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 12.129.258.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rencana Belanja Dinas Perdagangan

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.128.061.000	100
2	Belanja Langsung	8.001.197.000	100
Jumlah		12.129.258.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya materai dan buku cek	1.500.000	0,02
	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	60.000.000	0,75
	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	0,00
	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	5.000.000	0,07
	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	3.932.000	0,05
	Terbayarnya honor	126.600.000	1,59
	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	2.526.000	0,04
	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1.260.000	0,02
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	497.000	0,01
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	114.600.000	1,44
	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	4.598.200	0,06
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	358.206.500	4,48
	Pemeliharaan kantor	0	0,00
	Jumlah kendaraan yang terpelihara	35.242.000	0,44
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	0,07
	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	16.385.500	0,21
	Jumlah		735.347.200



Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018



Meningkatnya perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	54.000.000	0,68
Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	364.507.000	4,56

Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	372.938.400	4,67
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	3.280.000	0,04
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	6.471.124.400	80,88
TOTAL		8.001.197.000	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 6.471.124.400,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri dengan besaran 80,88 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan laporan kinerja dan keuangan yaitu sebesar 9,19% Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,04% dari total anggaran belanja langsung.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.1. Capaian IKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	206	160	77,66
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12	100
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	0	0
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	1	1	100
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	9	9	100
6	Terbayarnya honor	Bulan	12	12	100
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Item	169	169	100
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100
9	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100
10	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	TRW	4	4	100
11	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12	100
12	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	100
13	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	100
14	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Dokumen	6	6	100
15	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Pelaku Usaha	1000	163	16,3
16	Tersedianya Informasi IKM yang dapat diakses Masyarakat	Kecamatan	11	11	100
17	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	100	90,79	90,79
18	Terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Persen	100	83,48	83,48
19	Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri	Persen	100	-	-
20	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200	200	100
21	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga stabil dan terjangkau	Paket	136	136	100
22	Bangunan Pasar	Unit	5	5	100



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 22 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 22 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 88,89 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 16,67 persen telah memenuhi kriteria memuaskan, dan 16,67 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	206	160	77,66
	2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12	100
	3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	0	0
	4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	1	1	100
	5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	9	9	100
	6	Terbayarnya honor	Bulan	12	12	100
	7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Item	169	169	100
	8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100
	9	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100
	10	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	TRW	4	4	100
	11	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12	100
	12	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	100
	13	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	100
	14	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P,	Dok.	6	6	100



	DPA/DPA-P				
Rata-rata capaian					91,27

Dari 14 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 12 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan telah mencapai target sebesar 91,27 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dinas perdagangan terbentuk pada tahun 2017. Adapun perbandingan Capaian Kinerja tahun 2017 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		Satuan	2017	2018
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	189	160
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	0	0
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	1	1
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	5	9
6	Terbayarnya honor	Bulan	6	12
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Item	169	169
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	49	49
9	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	Trw	4	4



	dan konsultasi keluar daerah			
10	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	TRW	4	4
11	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12
12	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1
13	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1
14	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Dok.	6	6

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tidak ada perbandingan Capaian kinerja Tahun ini dengan Target jangka menengah karena Dinas Perdagangan Baru terbentuk Pada Tahun 2017.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa indikator yang belum mencapai target adalah :

1. Tersedianya Materai dan buku cek
2. Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3. Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya.
4. Tersedianya peralatan kebersihan kantor
5. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan ini adalah sebesar Rp.768.069.500,- dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp. 678.719.700 dan dari anggaran tersebut terealisasi



sebesar Rp.596.962.310 atau 87,96 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,27 berarti tingkat efisiensi sebesar 96,37 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan ini sebanyak 3 program dan 14 kegiatan, yaitu: program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 11 kegiatan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 Kegiatan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan dengan 1 kegiatan.

SASARAN 2 : Meningkatkan perlindungan konsumen

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTPP	Pelaku usaha	7,120	163	2,28

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya perlindungan konsumen belum mencapai target yaitu dengan capaian 2,28 persen.



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	102,21	85,36	82,67	18,05	2,28

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya perlindungan konsumen ini mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan dengan realisasi capaian 2,30 persen begitupun pada tahun 2017 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dari 82,67 persen. Pada tahun 2015 juga mengalami penurunan dari pesentase tahun 2014 yaitu 102,21 menjadi 85,36 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen ini setiap tahunnya mengalami penuruan.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	BUAH	27.484	10.677	38,88

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas



Perdagangan, maka belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP adalah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peralihan kewenangan Kabupaten/kota dalam rangka pelayanan tera/teraulang, Kabupaten Sidenreng Rappang belum punya SDM dan SAPRAS METROLOGI LEGAL.

Dan Solusi yang telah dilaksanakan adalah kerjasama dengan Kabupaten Wajo dalam hal pelayanan tera/tera ulang karena Kab. Sidrap belum mandiri dalam penyelenggaraan pelayanan Tera/tera ulang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perlindungan konsumen ini adalah sebesar Rp. 54.000.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.34.159.628 atau 63,25 Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 16,3 berarti tingkat efisiensi sebesar 388,09 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pencapaian pernyataan Sasaran meningkatnya perlindungan konsumen adalah program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.

Permasalahan:

- Kurangnya anggaran di Tahun 2018
- Tidak adanya SDM (Penera), untuk melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang



- Tidak adanya Sarana & Prasarana Tera/Tera Ulang
- Banyaknya UTTP yang rusak sehingga tidak ditera kembali
- Banyaknya pengusaha yang tidak melakukan transaksi lagi/berhenti
- Kurangnya kesadaran masyarakat

Solusi:

- Penambahan Anggaran di Tahun 2018
- Mengirim ASN untuk pelatihan Kemetrolgian
- Dianggarkan Belanja Modal untuk Sarana & Prasarana Metrologi legal.
- Melaksanakan sidang tera
- Melaksanakan pengawasan UTTP

SASARAN 3 Meningkatnya pembinaan/ koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pembinaan /koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Terwujudnya pembinaan / koordinasi IKM :				
	1. Cakupan Bina Kelompok IKM	KLP	124	93	75
	2. Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif	%	49	59,78	122
	3. Cakupan Jumlah IKM Baru	IKM	1.000 (5.040)	836 (4.890)	83,6
	4. Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	%	14,75	14,21	96,34
	5. Pertumbuhan Industri	%	3,89	4,81	123,65
	6. Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri	%	72	75,57	75,75



			(1.760)	(1.330)	
Rata-Rata Capaian					96,03

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 4 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM ini telah mencapai target yaitu dengan capaian 96,03 persen.

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Cakupan Bina Kelompok IKM	KLP	0	0,26	23,39	36,29	50,00
2. Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif	%	83,45	83,27	94,92	108,22	122
3. Cakupan Jumlah IKM Baru	IKM	83,75	91,17	95,50	96,43	97,02
4. Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	%	96,54	98,03	97,29	97,29	96,34
5. Pertumbuhan Industri	%	24,68	48,33	72,75	98,20	123,65
6. Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri	%	93,06	94,44	99,43	104,96	104,96
Rata-rata Capaian		61,91	69,25	80,55	90,23	99,00

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pembinaan/ koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM ini mengalami Peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 80,55 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 90,23 persen pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen. Kemudian 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 99,00 persen.



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Cakupan Bina Kelompok IKM	KLP	66	62	93,94
2. Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif	%	330	5,57	59,78
3. Cakupan Jumlah IKM Baru	IKM	850	92,74	97,02
4. Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	%	14,75	14,294	96,91
5. Pertumbuhan Industri	%	3,89	0,96	4,81
6. Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri	%	210	99,41	104,96

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan, maka 1 indikator telah mencapai target jangka menengah dan 5 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan :

1. Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2018 dengan penyerapan anggaran mencapai 88,73 persen dengan predikat kinerja baik.
2. Adanya kerjasama yang bbaik dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pemberdayaan SDM IKM yang ada
4. Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia
5. Dukungan dari para pelaku IKM dalam meningkatkan mutu produknya.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indicator pada sasaran meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM,



menurut cakupan jumlah jurnal IKM aktif dan produktif sebesar 59,78 % dari target 49% dan pertumbuhan industri 4,81 % dari target 3,89.

Penyebab kegagalan:

1. Jumlah personil pembina secara kualitas dan kuantitas masih kurang
2. Belum terpenuhinya sarana parasarana untuk pelayanan yang memadai

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Mengusulkan penambahan anggaran
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
4. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan maksimal

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja dilakuka beberapa analisis dan efesiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya manusia secara umum diberi tanggung jawab kepada setiap bagian sesuai dengan taget kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan analisis tupoksi masing-masing.

Untuk analisis atau efesiensi penggunaan sumber dana (anggaran) dalam melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dengan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien.



f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya jumlah IKM aktif dan produktif sesuai rencana meliputi Program Pengembangan IKM, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial .

Adapun Kegiatan yang direncanakan meliputi :

1. Program Pengembangan IKM meliputi :
 - Penyediaan sarana informasi Industri Kecil Menengah
 - Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Tahun 2018 direncanakan pelaksanaan 3 Kegiatan pada 2 program yang terealisasi hanya 2 kegiatan yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan penyediaan sarana informasi industri kecil dan menengah pembinaan dan pemibinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Untuk program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri dianggap tidak ada realisasi karena keterbatasan dana yang tersedia padahal kegiatan tersebut telah dipersiapkan dengan cara melaksanakan koordinasi dengan calon lokasi kegiatan dan pada prinsipnya bersedia melakukan selatelah selesainya moment pemilihan kepada daerah, bulan ramadhan dan kegiatan 17 Agustus. Sesuai DPA awal akan dilaksanakan pelatihan teknologi industri sebanak 3 kali pelatihan dengan jumlah peserta 20 orang atau sebanyak 60 orang namun DPPA anggarannya digeser untuk pencapaian target kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

SASARAN 5 : Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Rp.	7.200.000.000	6.032.891.784	83,48

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) dengan realisasi capaian 83,48 persen.

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	96,96	85,09	85,63	83,78	83,48

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) ini mengalami penurunan. Capaian kinerja tahun



2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari 85,63 Persen pada tahun 2016 menurun menjadi 83,78 persen pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 1,85 persen. Kemudian ditahun 2018 realisasi yang dicapai yaitu 83,48 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,27 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Persen	500	83,48	16,70

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah baru mencapai 83,48 dan tidak mencapai target realisasi renstra Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab kegagalan/penurunan Pencapaian indikator pada sasaran Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) adalah

1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan retribusi Pasar yang masih minim. Masyarakat masih sinis terhadap pembayaran retribusi pasar karena menganggap bahwa Retribusi Pasar adalah sebuah beban, bukan kewajiban.
2. Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah dan merasa keberatan terhadap tarif retribusi yang dikenakan.



3. Lemahnya penegakan hukum, sehingga wajib retribusi tidak takut melanggar aturan yang telah ditetapkan karena tidak adanya penerapan sanksi hukum.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan sosialisasi secara intensif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik di kantor maupun kegiatan lapangan.
3. Mengikutsertakan pegawai pada Bimtek dan Diklat yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi.
4. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses pemungutan dan pelaporan.
5. Mengintensifkan kegiatan penagihan tunggakan yang harus diikuti dengan penyediaan anggaran penagihan tunggakan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) ini adalah sebesar Rp 323.121.000 dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 372.938.400 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 346.400.039,- atau 92,88 begitupun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 92,88 berarti tingkat efisiensi sebesar 100%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah,

SASARAN 6 : Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku Usaha	200	100	50
	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil	Paket	80.136	136	0,16
	Pembangunan Pasar	Unit	5	5	100

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	-	-	-	-	50
Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	-	-	-	-	0,16
Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi	-	-	-	-	100



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri pada kegiatan pembangunan pasar telah terealisasi 100% dibandingkan dua kegiatan yang lainnya yang belum mencapai target.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil Pembangunan Pasar	Pelaku Usaha	-	100	-
		Paket	-	136	-
		Unit	-	14	-

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan Pencapaian indikator pada sasaran Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis ini sangat didukung dengan adanya dana DAK.

Tahun 2018 Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan fisik untuk peningkatan Sarana dan Prasarana yaitu Pembangunan Pasar Manisa, Massepe, Bilokka, Dongi dan Lancirang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ini adalah sebesar Rp.7.288.400.500,- dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp. 6.471.124.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.6.308.508.462,- atau



97,49 Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,13%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan Kegiatan Pembangunan Pasar.



B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 95,77 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri (97,49)**. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan perlindungan konsumen **(63,26)**.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang realisasi anggarannya mencapai 98,85% namun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel. 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

NO	SASARAN/INDIKATOR	Kinerja				Anggaran (RP).		
		SAT.	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Realisasi
I. Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					91,27	678.719.700	596.962.310	87,95
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lbr	206	160	77,66	1.500.000	973.000	64,87
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bln	12	12	100	60.000.000	36.161.930	60,27
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	0	0	3.850.000	0	0
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	1	1	100	5.000.000	4.987.000	99,74
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	9	9	100	8.000.000	2.283.000	58,06
6	Terbayarnya honor	Bln	12	12	100	126.600.000	102.360.000	80,85
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Item	169	169	100	2.526.000	2.526.000	100
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100	497.000	497.000	100
9	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100	114.600.000	114.584.130	99,99
10	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	TRW	4	4	100	4.598.200	4.140.000	90,04
11	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	12	12	100	358.206.500	327.840.250	91,52
12	Pemeliharaan kantor	Unit	1	-	-	-	-	-
13	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	100	35.242.000	29.340.000	83,25
14	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Dok.	6	6	100	16.385.500	16.198.000	98,86
II. Meningkatnya perlindungan konsumen					16,3	54.000.000	34.159.628	63,26
15	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera	Pelaku Usaha	1.000	163	16,3	54.000.000	34.159.628	63,26



	ulang alat UTTP								
iii. Meningkatnya pembinaan/ koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM						364.507.000	323.042.000	88,62	
16	Tersedianya informasi IKM yang dapat diakses masyarakat	Kec	11	11	100	23.719.000	13.644.000	57,52	
17	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	100	90,79	90,79	340.788.000	309.398.000	90,79	
iv. Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)						92,88	372.938.400	346.400.039	92,88
17	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	Persen	100	92,88	92,88	372.938.400	346.400.039	92,88	
v. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri						0	3.280.000	3.280.000	100
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Persen	100	0	0	3.280.000	3.280.000	100	
vi. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri							6.471.124.400	6.308.508.462	97,49
	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih murah	Pelaku usaha	200	100	50	20.400.500	20.332.620	97,49	
	Masyarakat memperoleh sembako dengan yang stabil dan terjangkau	Paket	80.136	136	0,16	388.925.400	388.925.400	100	
18	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	Unit	5	5	100	6.061.798.500	5.899.250.442	97,32	



Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 6 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu untuk kriteria pencapaian kinerja memuaskan dengan pencapaian sama atau lebih 90% yaitu Meningkatnya pembinaan/ koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM dengan realisasi kinerja 95,39 persen dan realisasi anggaran 88.62 persen.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
I. Peningkatan kualitas Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		81,99	88,78	108,28
1	Tersedianya materai dan buku cek	77,66	64,87	83,53
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	100	60,27	60,27
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	0	0
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	100	99,74	99,74
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	100	58,06	58,06
6	Terbayarnya honor	100	80,85	80,85
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100	100	100
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	100	100
9	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	99,99	100
10	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	100	90,04	90,04
11	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	91,52	91,52



12	Pemeliharaan kantor	0	0	0
13	Jumlah kendaraan yang terpelihara	100	83,25	83,25
14	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	100	66,67	66,67
II. Meningkatnya perlindungan konsumen		16,3	63,26	388,09
15	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	16,3	63,26	388,09
III. Meningkatnya pembinaan/ koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM		100	74,15	74,15
16	Tersedianya informasi IKM yang dapat diakses masyarakat	100	57,52	57,52
17	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM	100	90,79	90,79
IV. Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)		83,48	83,48	
18	Peningkatan penerimaan retribusi pasar	83,48	83,48	100
V. Program peningkatan kemampuan teknologi industri		0	100	0
19	Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industri	0	100	0
VI . Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri		50,05	98,66	197,12
20	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih murah	50	99,66	199,32
21	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau	0,16	100	62.500
22	Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	100	97,32	97,32



BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 adalah sangat baik 22 indikator, karena terdapat 17 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, 1 indikator sangat rendah, 2 indikator yang tidak memiliki realisasi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan.



Bagi instansi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik



Lampiran-lampiran :

Penghargaan yang diterima pada tahun 2017 adalah sebagai Berikut :

- Penetapan Pasar Tanru Tedong dan Pasar Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017